



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dikecualikan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut yang menerapkan Pola Keuangan BLUD.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur.
8. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BLUD yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

15. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
24. Pekerjaan Kongsruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
28. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
29. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
32. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Brang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
33. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
35. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa adalah batasan nilai dalam pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur yang bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. swakelola; dan
  - b. penyedia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur.

## Pasal 5

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Mansyur sesuai prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD KH. Mansyur.

## BAB III

## PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

## Pasal 6

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. PPHP/PjPHP;
- g. Penyelenggaran Swakelola; dan
- h. Penyedia.

## BAB IV

## JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

## Pasal 7

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :

- a. *E-Purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

## Pasal 8

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (2) Ketentuan jenjang nilai *E-purchasing* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Pejabat Pengadaan melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. PPK melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

- c. PA menetapkan penyedia *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Pada *E-purchasing* penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik dan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK.
  - (4) Pada *E-purchasing* tidak perlu menyusun HPS dan jaminan pelaksanaan.
  - (5) Dalam hal PPK menyerahkan proses *E-purchasing* kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan/referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan.
  - (6) Pelaksanaan *E-purchasing* mengacu pada prosedur untuk *E-purchasing*, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-purchasing* dan Panduan pengguna aplikasi *E-purchasing* (*user guide*) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai HPS sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan spesifikasi teknis tidak menyebutkan merek barang/jasa, penyebutan merek barang/jasa dimungkinkan pada komponen barang/jasa, suku cadang, dan bagian dari satu sistem yang sudah ada.
- (3) Pada Pengadaan langsung penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengadaan langsung dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang nilai HPS paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.



- (4) Kriteria Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi :
- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden, dan Wakil Presiden, Mantan Presiden, dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  - f. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- (5) Kriteria keadaan tertentu untuk pengadaan Jasa Konsultansi meliputi :
- a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaanya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia Jasa Konsultansi yang sama, *repeat order* dibatasi paling banyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 11

Tender Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

## Pasal 12

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

## Pasal 13

Tender Cepat dan Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tentang Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan nilai HPS paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

## Pasal 14

- (1) Bentuk kontrak berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - g. bukti pembelian/pembayaran;
  - h. kuitansi;
  - i. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - j. Surat Perjanjian; dan
  - k. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/*invoice*, struk, nota kontan, dan dokumen lainnya yang disetarakan.
- (3) Kuitansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (7) Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan kelengkapan lebih rinci dan/atau dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka surat pesanan dapat ditambahkan dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

## Pasal 15

- (1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## BAB V

## PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 16

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber dana, dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008